

Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDN 4 Panarung

Ditha Olivia¹, Tempel², Aprilina³, Tresiana⁴, Stevanus Adrian⁵, Ratih Sulistyowati⁶
Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email: ditapky22@gmail.com, kusnadipranata@gmail.com, aprilpro242003@gmail.com,
tresiana19@gmail.com, astevanus07@gmail.com, ratihsw13@gmail.com

Diterima: 25-05-2026 | Disetujui: 03-06-2026 | Diterbitkan: 05-06-2026

ABSTRACT

This study was conducted through field observation and direct interviews at SDN 4 Panarung, Palangka Raya City, with the aim of examining educational financial management practices at the school. The aspects studied include funding sources, budget planning mechanisms, fund allocation distribution, as well as the condition of the learning environment and facilities. The findings reveal that this school, which accommodates 219 students, has collaboratively drafted the RKAS by involving the principal, treasurer, teachers, and school committee based on an institutional priority scale. BOSP funds serve as the primary source for operational financing, facility maintenance, and learning activities. Furthermore, the school utilizes the ARKAS application as a digital-based budget management instrument to promote financial transparency and accountability, although its implementation still encounters several technical constraints. Overall, financial management at SDN 4 Panarung is considered to have functioned adequately and is capable of supporting the improvement of educational quality.

Keywords: Educational Financial Management, School Financial Administration, Operational Assistance for Educational Units (BOSP), RAKS, Field Observation.

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung di SDN 4 Panarung, Kota Palangka Raya, dengan tujuan menelaah praktik pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut. Aspek yang dikaji mencakup sumber pendanaan, mekanisme penyusunan anggaran, distribusi alokasi dana, serta kondisi lingkungan dan sarana pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah yang menampung 219 peserta didik ini telah menyusun RKAS secara kolaboratif dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Dana BOSP menjadi sumber utama pembiayaan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan pembelajaran. Selain itu, sekolah memanfaatkan aplikasi ARKAS sebagai instrumen pengelolaan anggaran berbasis digital guna mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan, meskipun penerapannya masih menghadapi beberapa kendala teknis. Secara keseluruhan, manajemen pembiayaan di SDN 4 Panarung dinilai telah berjalan memadai dan mampu menopang peningkatan mutu pendidikan.

Kata kunci: Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Adminitrasi Keuangan Sekolah, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), RAKS, Observasi Lapangan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Olivia, D., Tempel, T., Aprilina, A., Tresiana, T., Adrian, S. ., & Sulistyowati, R. (2026). Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDN 4 Panarung. *Educational Journal*, 1(4), 1628-1640.
<https://doi.org/10.63822/jtsgw852>

PENDAHULUAN

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Secara teoritis, manajemen pembiayaan didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan pembiayaan yang ideal harus berlandaskan pada lima prinsip utama, yakni akuntabilitas, transparansi, integritas, konsistensi, serta efektivitas dan efisiensi. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, sekolah diharapkan mampu mengalokasikan dana secara tepat sasaran untuk mendukung seluruh aktivitas pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana, pembayaran tenaga pendidik, hingga pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan wajib berpedoman pada prinsip keadilan, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas publik, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan demi terwujudnya mutu pendidikan yang optimal.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang kerap berbeda dari kondisi ideal tersebut. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Azhari dan Kurniady menyatakan bahwa tidak sedikit sekolah yang belum mampu menyelaraskan antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga dana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan mutu. Lebih lanjut, penelitian Pebriyanti dan Aliyyah menemukan bahwa tantangan utama pengelolaan dana BOS di sekolah dasar meliputi lemahnya pertanggungjawaban bendahara sekolah, ketidakseimbangan antara kebutuhan akademik dan administratif, serta risiko penyalahgunaan dana akibat lemahnya pengawasan. Realitas serupa juga terjadi di SDN 4 Panarung, Kota Palangka Raya, di mana berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sekolah menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi ARKAS sebagai sistem pelaporan keuangan digital, khususnya keterbatasan jenis belanja yang tersedia dalam sistem dan kesulitan penginputan data tertentu. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tuntutan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan kapasitas teknis maupun administratif yang dimiliki oleh sekolah di lapangan.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan tersebut menjadikan penelitian tentang manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah dasar sangat penting untuk dilakukan. Pembiayaan yang tidak dikelola secara terencana, transparan, dan akuntabel akan berimplikasi langsung pada menurunnya kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana SDN 4 Panarung mengelola pembiayaannya secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pengalokasian, penggunaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Sebagai solusi atas permasalahan yang ada, penelitian ini berupaya menghasilkan deskripsi empiris yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak sekolah maupun pemangku kebijakan dalam memperbaiki tata kelola keuangan sekolah, sehingga dana yang diterima benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema manajemen pembiayaan pendidikan dari berbagai sudut pandang. Suryaman dan Trisnawati mengkaji strategi manajemen pembiayaan pendidikan dasar beserta implikasinya terhadap mutu sekolah dan menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran berbasis skala prioritas menjadi kunci efektivitas pengelolaan dana. Anwar dkk. meneliti implementasi strategi manajemen pembiayaan pada SDN 42 Talang Ubi dan menemukan bahwa keterlibatan aktif seluruh

memangku kepentingan dalam penyusunan RKAS berpengaruh positif terhadap mutu sekolah. Sementara itu, Mesiono dan Haidir menganalisis konsep manajemen pembiayaan dan implikasinya terhadap mutu pendidikan secara teoritis, dan membuktikan bahwa kepala sekolah memegang peranan sentral dalam mengorganisasikan pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab. Adapun Mesiono dkk. meneliti manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai dengan pendekatan studi kasus dan menemukan bahwa pengawasan ketat oleh pimpinan sekolah terbukti meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik manajemen pembiayaan di sekolah dasar negeri penerima dana BOSP (Bantuan Operasional Sekolah Provinsi) di wilayah Kalimantan Tengah, menggunakan pendekatan observasi dan wawancara langsung di SDN 4 Panarung. Penelitian ini pun mengintegrasikan analisis terhadap penggunaan sistem digital ARKAS dalam perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah, sebuah aspek yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan: bagaimana praktik manajemen pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung dijalankan secara menyeluruh dari aspek perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan? Secara lebih rinci, pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (1) apa saja sumber pembiayaan pendidikan yang digunakan SDN 4 Panarung?; (2) bagaimana proses penyusunan RKAS dan pihak-pihak yang terlibat?; (3) bagaimana dana sekolah dialokasikan dan digunakan untuk kebutuhan operasional serta peningkatan mutu?; dan (4) bagaimana sistem administrasi dan pelaporan keuangan sekolah dijalankan? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung sebagai upaya menghasilkan gambaran empiris yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Tipe dan Scope Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menganalisis fenomena secara mendalam sebagaimana adanya di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami proses dan makna dari praktik manajemen pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung secara holistik, sebagaimana dikemukakan Moleong bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan, yakni SDN 4 Panarung yang berlokasi di Jalan Bangaris VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Fokus penelitian dibatasi pada empat aspek utama manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu: (1) sumber pembiayaan pendidikan; (2) proses perencanaan pembiayaan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); (3) pengalokasian dan penggunaan dana sekolah; serta (4) sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Aspek-aspek di luar keempat fokus tersebut, seperti manajemen kurikulum dan manajemen sumber daya manusia, tidak menjadi bagian dari cakupan penelitian ini. Jenis data yang dibutuhkan mencakup data primer berupa hasil observasi

dan wawancara langsung, serta data sekunder berupa dokumen resmi sekolah seperti RKAS, laporan keuangan, dan dokumen ARKAS.

Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa partisipan yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fokus penelitian. Adapun pertimbangan relevansi keilmuan dan posisi struktural menjadi dasar utama pemilihan, sebagaimana direkomendasikan oleh beberapa ahli penelitian manajemen pendidikan.

Partisipan penelitian terdiri dari tiga orang, yaitu: (1) Kepala Sekolah SDN 4 Panarung, selaku penanggung jawab utama pengelolaan keuangan sekolah dan pengambil keputusan strategis dalam penyusunan RKAS; (2) Bendahara Sekolah, selaku pelaksana teknis pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan sekolah; serta (3) Perwakilan Komite Sekolah, selaku unsur pengawas eksternal yang terlibat dalam proses musyawarah perencanaan anggaran. Ketiga partisipan tersebut dipilih karena memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam siklus manajemen pembiayaan sekolah. Jumlah partisipan sebanyak tiga orang dinilai memadai sesuai dengan prinsip kecukupan data dalam penelitian kualitatif, di mana kedalaman informasi lebih diutamakan daripada kuantitas partisipan. Dari sisi etika penelitian, seluruh partisipan dilibatkan secara sukarela dan telah memberikan persetujuan untuk diwawancarai. Identitas partisipan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian, dan data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademis.

Tabel 1. Profil Partisipan Penelitian

No.	Partisipan	Peran dalam Penelitian	Kode
1	Kepala Sekolah	Penanggung jawab pengelolaan keuangan dan pengambil keputusan RKAS	P1
2	Guru	Pelaksana proses pembelajaran serta pemberi informasi terkait penggunaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah	P2

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif di mana peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, dan pelapor hasil penelitian. Selain itu, digunakan pula beberapa instrumen pendukung sebagai berikut.

Pertama, pedoman wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview guide*). Instrumen ini berisi daftar pertanyaan terbuka yang telah disusun secara sistematis berdasarkan empat fokus penelitian, namun tetap memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan wawancara. Pedoman wawancara mencakup empat klaster pertanyaan, yaitu: (a) sumber pembiayaan dan penerimaannya; (b) proses perencanaan dan penyusunan RKAS; (c) mekanisme pengalokasian dan penggunaan dana; serta (d) sistem administrasi, pelaporan, dan pengawasan keuangan. Instrumen ini dipilih karena mampu menggali informasi yang mendalam dan kontekstual dari partisipan, berbeda dengan kuesioner tertutup yang hanya menghasilkan data permukaan.

Kedua, lembar observasi. Instrumen ini digunakan untuk mencatat kondisi fisik sekolah, aktivitas pengelolaan keuangan yang teramati, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penggunaan dana pendidikan. Lembar observasi berfungsi sebagai pelengkap dan konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari wawancara. Ketiga, alat perekam audio dan kamera. Alat perekam digunakan untuk mendokumentasikan jalannya wawancara secara akurat, sehingga tidak ada informasi yang terlewat dalam proses transkripsi. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kondisi fisik sekolah dan fasilitas yang relevan. Keempat, dokumen resmi sekolah, meliputi RKAS, laporan penggunaan dana BOS/BOSP, dan dokumen pelaporan ARKAS yang berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk triangulasi.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi: penyusunan dan pengembangan instrumen penelitian (pedoman wawancara dan lembar observasi), pengurusan izin penelitian kepada pihak sekolah, serta koordinasi awal dengan partisipan terkait jadwal dan mekanisme pengambilan data. Tahap ini dilaksanakan pada akhir April 2026.

Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang dilaksanakan pada hari Senin, 4 Mei 2026, pukul 09.00–10.30 WIB, bertempat di SDN 4 Panarung. Situasi penelitian berlangsung pada hari aktif sekolah dalam suasana yang kondusif. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan sekolah dan proses pembelajaran, dilanjutkan dengan wawancara terhadap tiga partisipan secara bergantian. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 20 hingga 30 menit, direkam dengan alat perekam audio setelah mendapat persetujuan partisipan. Peneliti mengajukan pertanyaan sesuai pedoman wawancara, dan partisipan menjawab secara bebas namun terarah.

Tahap ketiga adalah pengolahan dan analisis data, yang dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Pada tahap ini, rekaman wawancara ditranskripsikan secara verbatim, catatan observasi disistematisasikan, dan dokumen sekolah dikumpulkan sebagai data pendukung. Seluruh proses penelitian, dari persiapan hingga penyelesaian laporan, berlangsung selama kurang lebih empat minggu, yakni dari akhir April hingga akhir Mei 2026.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, observasi langsung (*direct observation*). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi fisik sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta aktivitas pengelolaan keuangan yang dapat diamati. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti berperan sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati.¹

Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara lebih komprehensif dari tiga partisipan kunci mengenai proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga, studi dokumentasi (*documentary study*). Peneliti mengkaji dokumen-dokumen resmi sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, antara lain RKAS tahun berjalan, laporan realisasi penggunaan dana BOSP, dan data pelaporan melalui

aplikasi ARKAS. Studi dokumentasi berfungsi untuk memverifikasi dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).

Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan transkripsi rekaman wawancara secara verbatim, kemudian mengkode setiap satuan informasi sesuai dengan tema dan fokus penelitian. Kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yang sesuai dengan pertanyaan penelitian: sumber pembiayaan, perencanaan RKAS, pengalokasian dan penggunaan dana, serta sistem administrasi keuangan. Pada tahap penyajian data, hasil kodifikasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel ringkasan, dan kutipan langsung hasil wawancara untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan interpretasi terhadap pola-pola yang muncul dari data, lalu mencocokkannya dengan teori dan temuan penelitian terdahulu untuk menghasilkan kesimpulan yang credible dan transferable.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketiga partisipan (kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah), sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara sumber, peneliti melakukan pengecekan ulang kepada partisipan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil SDN 4 Panarung

SDN 4 Panarung merupakan sekolah dasar negeri yang berlokasi di Jalan Bangaris VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada 4 Mei 2026, sekolah ini menyelenggarakan pendidikan dasar bagi 219 peserta didik yang terdistribusi dari kelas I hingga kelas VI. Sekolah didukung oleh 13 orang tenaga pendidik dan 3 orang tenaga kependidikan. Secara umum, kondisi lingkungan sekolah cukup tertata dan kondusif, dengan ketersediaan ruang kelas, ruang guru, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai. Gambaran ringkas profil sekolah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Profil SDN 4 Panarung Kota Palangka Raya

Aspek	Keterangan
Nama Sekolah	SD Negeri 4 Panarung
Alamat	Jl. Bangaris VIII, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalteng
Status	Negeri
Jumlah Peserta Didik	219 siswa (Kelas I–VI)

Jumlah Tenaga Pendidik	13 orang
Tenaga Kependidikan	3 orang
Sumber Dana Utama	Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP)
Sistem Pelaporan Keuangan	Aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

Sumber: Data Observasi dan Wawancara, 4 Mei 2026

Sumber Pembiayaan Pendidikan di SDN 4 Panarung

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, sumber utama pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Dana BOSP ini merupakan satu-satunya sumber pendanaan resmi yang dikelola sekolah, mengingat sekolah tidak memungut iuran atau sumbangan apapun dari orang tua peserta didik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

"Sekolah kami sepenuhnya mengandalkan dana BOSP dari pemerintah provinsi. Tidak ada pungutan dari orang tua, semua kebutuhan operasional dibiayai dari dana tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku." (P1, Kepala Sekolah, 4 Mei 2026)

Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan yang dikemukakan Mushtofa dkk., bahwa sekolah negeri pada jenjang dasar idealnya menerapkan sistem pembiayaan berbasis bebas sumbangan, di mana seluruh operasional sekolah ditanggung oleh pemerintah melalui skema bantuan operasional.² Besaran dana BOSP yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar, sehingga SDN 4 Panarung dengan 219 siswa menerima alokasi yang proporsional dengan kebutuhannya. Dana tersebut dicairkan secara periodik dalam dua tahap per tahun anggaran dan langsung masuk ke rekening sekolah untuk segera dikelola sesuai RKAS yang telah disusun.

Tabel 2. Sumber dan Mekanisme Penerimaan Dana SDN 4 Panarung

Sumber Dana	Jenis	Pencairan	Dasar Perhitungan
BOSP (Provinsi Kalteng)	APBD Provinsi	2 tahap/tahun	Jumlah peserta didik
Iuran orang tua	—	—	Tidak dipungut
Sumber lain	—	—	Tidak ada

Sumber: Wawancara P1 dan P2, 4 Mei 2026

Proses Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan di SDN 4 Panarung dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran. Proses ini melibatkan beberapa pihak secara kolektif, yakni kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah sebagai pelaksana teknis, seluruh guru sebagai pemberi masukan kebutuhan pembelajaran, serta perwakilan komite sekolah sebagai unsur pengawasan eksternal.

Tahapan penyusunan RKAS diawali dengan identifikasi kebutuhan sekolah secara menyeluruh. Setiap unit kerja dan guru menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi, dan pemeliharaan fasilitas. Kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan skala prioritas oleh kepala sekolah dan bendahara, dengan mempertimbangkan ketentuan penggunaan dana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Penyusunan RKAS kami lakukan bersama-sama. Kepala sekolah, bendahara, guru-guru, dan komite sekolah duduk bersama untuk menentukan apa saja yang paling dibutuhkan sekolah. Setelah itu baru kami masukkan ke dalam aplikasi ARKAS sesuai komponen yang tersedia." (P3, Perwakilan Komite Sekolah, 4 Mei 2026)

Proses perencanaan ini selaras dengan prinsip yang dikemukakan oleh Suryaman dan Trisnawati, bahwa perencanaan anggaran sekolah dasar yang efektif harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan berpijak pada analisis kebutuhan yang komprehensif serta skala prioritas yang terukur. Senada dengan itu, Anwar dkk. menegaskan bahwa keterlibatan aktif guru dan komite sekolah dalam penyusunan RKAS merupakan salah satu faktor kunci yang membedakan sekolah dengan pengelolaan keuangan yang baik dari yang kurang baik.

Dalam pelaksanaannya, sekolah menggunakan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai sistem digital untuk penyusunan sekaligus pelaporan anggaran kepada pemerintah. Namun, penggunaan aplikasi ini tidak lepas dari kendala. Bendahara sekolah mengungkapkan bahwa terdapat keterbatasan jenis komponen belanja yang tersedia dalam sistem ARKAS, sehingga tidak semua kebutuhan sekolah dapat diakomodasi secara langsung dan memerlukan penyesuaian dalam penginputannya.

"Kendalanya di ARKAS itu kadang komponen belanjanya terbatas, tidak semua kebutuhan sekolah ada di sana. Jadi kami harus menyesuaikan agar tetap sesuai aturan tapi kebutuhan juga terpenuhi." (P2, Bendahara Sekolah, 4 Mei 2026)

Pengalokasian dan Penggunaan Dana Sekolah

Setelah RKAS disahkan, dana BOSP yang diterima sekolah dialokasikan ke berbagai komponen kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, penggunaan dana difokuskan pada beberapa komponen utama, yaitu: (1) pembelian alat tulis kantor dan perlengkapan pembelajaran; (2) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; (3) kegiatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik; (4) honorarium tenaga kependidikan non-PNS; serta (5) kegiatan penunjang seperti penilaian, administrasi sekolah, dan kegiatan kesiswaan.

Tabel 3. Komponen Penggunaan Dana BOSP di SDN 4 Panarung

No.	Komponen Penggunaan Dana	Keterangan
1	Alat tulis kantor dan perlengkapan pembelajaran	Rutin setiap semester
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Sesuai kebutuhan/kondisi
3	Kegiatan pembelajaran dan pengembangan peserta didik	Sesuai kalender akademik
4	Honorarium tenaga kependidikan non-PNS	Rutin bulanan
5	Administrasi sekolah dan kegiatan kesiswaan	Sesuai kebutuhan

Sumber: Wawancara P1, P2, dan Studi Dokumentasi RKAS, 4 Mei 2026

Pengalokasian dana dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan yang berdampak langsung pada kegiatan pembelajaran peserta didik. Kepala sekolah menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan komponen yang telah direncanakan dalam RKAS.³ Hal ini selaras dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang dikemukakan Simamora dkk., bahwa pengelolaan dana pendidikan harus terfokus pada hasil yang diharapkan dan dilaksanakan secara efektif demi mendukung peningkatan mutu pendidikan.

"Kami selalu memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan RKAS. Tidak boleh ada pengeluaran di luar yang sudah direncanakan, apalagi untuk kepentingan pribadi. Semua harus untuk kepentingan pembelajaran siswa." (P1, Kepala Sekolah, 4 Mei 2026)

Temuan ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian Pebriyanti dan Aliyyah yang menyatakan bahwa dana BOS/BOSP memberikan manfaat nyata bagi sekolah dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, terpenuhinya kebutuhan belajar siswa, serta meningkatnya kesejahteraan guru honorer melalui pembayaran honorarium yang bersumber dari dana tersebut.

Sistem Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan

Sistem administrasi keuangan di SDN 4 Panarung dijalankan oleh bendahara sekolah yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Pencatatan keuangan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi ARKAS, yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pembukuan, dan pelaporan dalam satu platform. Setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan dana dicatat secara sistematis dan disertai dengan bukti-bukti pendukung seperti kuitansi, nota pembelian, dan surat pertanggungjawaban.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis BOSP. Laporan tersebut mencakup realisasi penggunaan dana, sisa saldo, serta rencana penggunaan pada periode berikutnya. Selain pelaporan kepada pemerintah, sekolah juga menyampaikan laporan keuangan kepada komite sekolah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal.

"Setiap penggunaan dana selalu kami catat di ARKAS dan disertai bukti-buktinya. Laporan keuangan kami sampaikan ke dinas dan juga ke komite sekolah supaya semua pihak tahu bagaimana dana itu digunakan." (P2, Bendahara Sekolah, 4 Mei 2026)

Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan SDN 4 Panarung ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, serta sejalan dengan temuan Azhari dan Kurniady yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan merupakan bentuk konkret penerapan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Meskipun demikian, sistem administrasi keuangan di SDN 4 Panarung tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Kendala teknis pada aplikasi ARKAS, seperti terbatasnya komponen belanja yang tersedia dan kesulitan dalam penginputan jenis pengeluaran tertentu, menjadi hambatan yang kerap dihadapi oleh bendahara sekolah. Dalam menghadapi kendala tersebut, pihak sekolah melakukan konsultasi dengan dinas pendidikan dan menyesuaikan perencanaan anggaran agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan

ini menunjukkan bahwa meskipun sistem digital seperti ARKAS telah membantu mempermudah proses pelaporan, kapasitas teknis pengelola keuangan sekolah perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan dana dapat berjalan lebih optimal.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung telah berjalan dengan cukup baik dan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang berlaku. Pengelolaan dana BOSP dilakukan melalui siklus yang sistematis, mulai dari perencanaan melalui RKAS, pengalokasian berdasarkan skala prioritas, pencatatan dan pelaporan melalui ARKAS, hingga pertanggungjawaban kepada pemerintah dan komite sekolah.

Temuan ini mendukung dan memperkuat argumen Mesiono dan Haidir bahwa kepala sekolah yang mampu mengorganisasikan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan secara terencana, transparan, dan bertanggung jawab akan berkontribusi nyata pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Keterlibatan aktif berbagai pihak — kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah dalam penyusunan RKAS di SDN 4 Panarung mencerminkan praktik pengelolaan yang partisipatif dan akuntabel, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Mesiono dkk.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi area yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Kendala teknis pada aplikasi ARKAS dan keterbatasan kapasitas administratif bendahara sekolah dalam menghadapi kompleksitas sistem pelaporan digital mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan sekolah melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, potensi terjadinya kesalahan pelaporan yang dapat berimplikasi pada tidak disalurkannya dana periode berikutnya tetap menjadi risiko yang perlu dimitigasi.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah dasar tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana yang memadai, tetapi juga oleh kapasitas teknis pengelola, kelengkapan sistem pelaporan, dan kualitas koordinasi antarstakeholders dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung Kota Palangka Raya telah dilaksanakan secara sistematis dan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang berlaku, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Secara lebih rinci, simpulan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, sumber pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung sepenuhnya berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak ada pungutan atau iuran yang dibebankan kepada orang tua peserta didik, sehingga prinsip pendidikan gratis pada jenjang dasar telah diterapkan secara konsisten. Dana dicairkan dalam dua tahap per tahun anggaran dan besarnya dihitung proporsional berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar, yakni 219 siswa. Ketergantungan sekolah pada satu sumber dana ini di satu sisi menjamin kepastian

pembiayaan, namun di sisi lain juga membatasi fleksibilitas sekolah dalam merespons kebutuhan yang muncul di luar komponen yang telah ditetapkan pemerintah.

Kedua, proses perencanaan pembiayaan pendidikan di SDN 4 Panarung dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada awal tahun ajaran secara partisipatif, melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan perwakilan komite sekolah. Proses ini diawali dengan identifikasi kebutuhan oleh seluruh unit kerja, dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas, dan diformalisasikan melalui aplikasi ARKAS sebagai platform pelaporan digital. Keterlibatan multipihak dalam penyusunan RKAS mencerminkan praktik manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kendati demikian, keterbatasan komponen belanja dalam sistem ARKAS dan kesulitan teknis dalam penginputan data menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui pembaruan sistem dan peningkatan kapasitas operator.

Ketiga, pengalokasian dan penggunaan dana BOSP di SDN 4 Panarung dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembelajaran dan operasional sekolah. Lima komponen utama penggunaan dana meliputi: pembelian alat tulis dan perlengkapan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran dan pengembangan peserta didik, honorarium tenaga kependidikan non-PNS, serta kegiatan administrasi dan kesiswaan. Seluruh pengeluaran merujuk pada RKAS yang telah disahkan dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang valid. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penggunaan dana yang berbasis prioritas dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan manfaat pembiayaan bagi peningkatan mutu pendidikan.

Keempat, sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan di SDN 4 Panarung dijalankan oleh bendahara sekolah dengan memanfaatkan aplikasi ARKAS sebagai instrumen pencatatan dan pelaporan digital. Laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada dinas pendidikan provinsi dan komite sekolah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Meski demikian, kendala teknis pada aplikasi ARKAS dan terbatasnya kapasitas pengelola keuangan dalam menghadapi kompleksitas sistem pelaporan digital mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah dana yang tersedia, tetapi sangat bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan pengalokasian, kepatuhan dalam penggunaan, dan konsistensi dalam pertanggungjawaban keuangan. Kesenjangan antara kondisi ideal pengelolaan keuangan sekolah dengan realitas di lapangan masih ada, dan hal tersebut menuntut kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, pemerintah daerah, dan komite sekolah dalam membangun tata kelola keuangan sekolah yang semakin baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut.

Pertama, bagi pihak SDN 4 Panarung, khususnya bendahara sekolah, disarankan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi ARKAS secara berkala guna meningkatkan kompetensi teknis dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, sekolah juga perlu mendokumentasikan setiap

kendala yang dihadapi dalam penggunaan ARKAS dan melaporkannya kepada dinas pendidikan sebagai bahan masukan perbaikan sistem.

Kedua, bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Dinas Pendidikan, disarankan untuk memperluas cakupan komponen belanja yang tersedia dalam aplikasi ARKAS agar lebih mengakomodasi keragaman kebutuhan operasional sekolah dasar di lapangan. Di samping itu, perlu adanya program pendampingan teknis yang rutin dan terstruktur bagi bendahara sekolah di seluruh wilayah, khususnya di sekolah-sekolah yang memiliki sumber daya manusia terbatas.

Ketiga, bagi komite sekolah, disarankan untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan penggunaan dana BOSP, tidak hanya pada tahap perencanaan (penyusunan RKAS), tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Pengawasan yang lebih intensif dari komite sekolah akan memperkuat akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan subjek penelitian ke beberapa sekolah dasar sekaligus untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif terkait praktik manajemen pembiayaan pendidikan di lingkungan sekolah dasar negeri, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah atau daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amka. (2021). *Buku ajar manajemen dan administrasi sekolah*. Nizamia Learning Center.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mustari, M. (2022). *Manajemen pendidikan di era merdeka belajar*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Zamroni. (2007). *Meningkatkan mutu sekolah*. PSAP Muhammadiyah.
- Anwar, S., dkk. (2024). Implementasi strategi manajemen pembiayaan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 42 Talang Ubi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2), 26-36.
- Djuwairiyah, Muqit, A., & Listiana, H. (2021). Manajemen pembiayaan dalam mutu pendidikan. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 4(2), 81-93.
- Habsyi, I. (2015). Manajemen pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate. *Edukasi*, 13(2), 542-554.
- Imron, M. J. (2016). Manajemen pembiayaan sekolah. *Al-Ibrah*, 1(1), 69-93.
- Mesiono & Haidir. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan (analisis konsep dan implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61-73.
- Mesiono, M., Suswanto, S., Lubis, R. R., & Haidir, H. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 13(1), 119-134.

- Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64-76.
- Pebriyanti, D., & Aliyyah, R. R. (2024). Manajemen keuangan: Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2716-2737.
- Simamora, D. F., Manik, I. S., Simare-Mare, Y., & Turnip, H. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 1(4), 170-180.
- Sukatin, Rukmanah, S., Rosanti, & Karim, H. (2023). Manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 277-282.
- Suryaman, M., & Trisnawati, A. (2024). Kajian manajemen pembiayaan pendidikan dasar: Strategi, tantangan, dan implikasinya terhadap mutu sekolah. *Jurnal Tahsinia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- P1 (Kepala Sekolah SDN 4 Panarung). (2026, 4 Mei). *Wawancara tentang manajemen pembiayaan pendidikan* [Rekaman wawancara]. SDN 4 Panarung, Palangka Raya.
- P2 (Bendahara Sekolah SDN 4 Panarung). (2026, 4 Mei). *Wawancara tentang sistem administrasi keuangan sekolah* [Rekaman wawancara]. SDN 4 Panarung, Palangka Raya.
- P3 (Perwakilan Komite Sekolah SDN 4 Panarung). (2026, 4 Mei). *Wawancara tentang perencanaan dan pengawasan keuangan sekolah* [Rekaman wawancara]. SDN 4 Panarung, Palangka Raya.
- Tim Peneliti. (2026, 4 Mei). *Catatan lapangan observasi SDN 4 Panarung*. SDN 4 Panarung, Palangka Raya.